

Pentahelix's function in developing tourist areas in Negeri Liang, Salahutu District

Jeane Talakua^{1*}, Mike J Rolobessy²

¹Universitas Negeri Semarang, ²Universitas Pattimura

Corresponding Author: Jeane Talakua talakuajeane@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Pentahelix, Development, Tourist Area, Liang Country

Received : 5 February

Revised : 15 February

Accepted: 20 March

©2024 Talakua, Rolobessy: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Efforts to develop tourism in Maluku by implementing the Pentahelix Concept are one of the offers from the Ministry of Tourism related to tourism development in an area. However, the application of the pentahelix concept is not yet fully optimal in strategic tourist areas such as Liang Country. The important role of all stakeholders in tourism development. These parties are the regional government, Liang state government, business actors, and the community/society plus the media. These parties constitute a unit that is complementary and interrelated. The pentahelix model seeks to encourage the tourism sector and the tourism system by increasing roles in creating economic benefits that can be taken from tourism activities in Liang Country, thereby creating a wide multiplier effect for the people of Liang Country

Fungsi Pentahelix dalam Pengembangan Kawasan Wisata di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu

Jeane Talakua^{1*}, Mike J Rolobessy²

¹Universitas Negeri Semarang, ²Universitas Pattimura

Corresponding Author: Jeane Talakua talakuajeane@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pentahelix, Pengembangan, Kawasan Wisata, Negeri Liang

Received : 5 February

Revised : 15 February

Accepted: 20 March

©2024 Talakua, Rolobessy: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Usaha mengembangkan Kepariwisata di Maluku dengan penerapan Konsep Pentahelix merupakan salah satu tawaran dari Kementerian Pariwisata terkait dengan pengembangan pariwisata di suatu daerah. Namun penerapan konsep pentahelix belum sepenuhnya optimal pada kawasan wisata yang strategis seperti di Negeri Liang. Pentingnya peran dari semua pihak pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah daerah, pemerintah negeri Liang, pelaku usaha, dan komunitas /Masyarakat ditambah dengan media. Para pihak ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling terkait. Model pentahelix berupaya mendorong sektor pariwisata dan sistem kepariwisataan dengan meningkatkan peran-peran untuk menciptakan nilai manfaat ekonomis yang dapat diambil dari aktivitas kepariwisataan di Negeri Liang sehingga menimbulkan multiplier effect yang luas bagi Masyarakat Negeri Liang

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat dapat bekerjasama untuk menjamin Pembangunan, dan mempertahankan budaya dan alam. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada Bab IV Pembangunan Kepariwisataan Pasal 6 Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Karakteristik kepulauan di Provinsi Maluku memberikan peluang potensi alam yang dapat di jadikan sebagai objek pariwisata, terutama wisata bahari termasuk potensi pariwisata pantai dan potensi pariwisata bawa laut. Karena daerah dengan luas wilayah lautnya lebih besar tentu menyimpan sejuta kekayaan alam. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan suatu kerja sama dalam pengembangan pariwisata. Pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, sosial dan budaya perlu dibangun antara pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang ada.

Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 Km², terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten kota yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Baru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru dan 2 Kota yaitu kota ambon dan kota Tual¹. Masing-masing Kabupaten memiliki Objek dan Daya Tarik Wisata (OTDW) yang potensial dan beranekaragam (Renstra Provinsi Maluku). Sejak lama wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Maluku dikenal dengan gugusan pulau yang memberikan karakteristik khas karena Sebagai besar daerah maluku adalah kepulauan.

Dalam usaha mengembangkan Kepariwisataan di Maluku, Konsep Pentahelix merupakan salah satu tawaran dari Kementerian Pariwisata terkait dengan pengembangan pariwisata. Tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia No 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata yang berkelanjutan. Konsep Pentahelix yaitu unsur kolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak diantaranya, Academy, Business, Community, Government, dan Media. Model pentahelix ini berupaya mendorong sektor pariwisata dan sistem kepariwisataan dengan meningkatkan peran government, business, community, academic, dan media, Tujuannya untuk memastikan kualitas, fasilitas, pelayanan dan menciptakan pengalaman serta nilai manfaat pariwisata pada ekonomi yang bisa dipetik dari aktivitas kepariwisataan serta menimbulkan multiplier effect yang luas bagi masyarakat pada umumnya dan para pelaku pariwisata.

Namun penerapan konsep pentahelix belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada kawasan wisata yang strategis. Kerjasama yang belum optimal antar aktor-aktor yang terlibat, dan aktor-aktor belum sepenuhnya aktif dalam menjalankan peran mereka sebagai stakeholder. Salah satunya adalah wisata

bahari yang ada di Provinsi Maluku khususnya Kabupaten Maluku Tengah yaitu Objek Wisata Pantai Hunimua yang berada pada Negeri Liang Kecamatan Salahutu. Pantai Hunimua adalah salah satu Destinasi Wisata yang dikelola oleh Pemerintah yang artinya Pantai Hunimua memberikan sumbangsih yang besar untuk Pemerintah daerah. Pantai ini pernah dinobatkan oleh UNDP-PBB sebagai pantai terindah di Indonesia pada tahun 1990 dan selalu menjadi incaran para investor asing². Akan tetapi, hal ini tidak membuat objek wisata Pantai Hunimua memiliki daya tarik berbeda dan tidak berkembang serta masyarakat di negeri Liang belum sepenuhnya merasakan dampak yang nyata bagi mereka.

Hal ini terkait dengan masalah belum adanya pola kerjasama yang terbentuk secara jelas antara pemerintah, Masyarakat/komunitas-komunitas local Negeri Liang, pihak akademik, pelaku bisnis/wirausaha ditambah dengan media sebagai expander. Seharusnya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan kesejahteraan dan keberlanjutan secara ekonomi, social maupun budaya bagi Masyarakat sekitar. Butuh Komitmen Bersama yang jelas antara peran-peran tersebut. Negeri Liang masuk sebagai kawasan strategis provinsi di Provinsi Maluku berdasarkan aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi (Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033)³. Ditegaskan pula dalam Rencana Strategis (renstra) 2006–2007 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bahwa pelaksanaan otonomi daerah, kebudayaan dan pariwisata merupakan salah satu sumber daya yang diharapkan mampu memberi kontribusi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat (Maluku-Tale.com, 2021). Untuk itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memprioritaskan penataan negeri Liang serta menjadi kewajiban masyarakat untuk berkomitmen menetapkan negeri Liang sebagai Kawasan Strategis Provinsi Maluku. Hal ini seharusnya dapat menjadi peluang bagi masyarakat negeri Liang yang didalamnya ada komunitas-komunitas local untuk membangun desanya bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji fungsi pentahelix dalam pengembangan kawasan wisata yang berujung pada model kerjasama pentahelix untuk mendongkrak potensi wisata di Negeri Liang.

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu strategi pengembangan sektor pariwisata yang dilaksanakan yakni penerapan konsep pentahelix, yang pada awalnya digagas oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya dan kemudian dikodifikasikan dalam Peraturan Menteri Pariwisata (Permen) Republik Indonesia NO.14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Berkelanjutan⁴. Destinasi Wisata. Model pentahelix bertujuan untuk memotivasi industri pariwisata dan sistem pariwisata dengan meningkatkan peran government, academia, business, community, dan media untuk menghasilkan nilai bagi masyarakat dan keuntungan lingkungan dari pariwisata. Menurut Rampersad, Quester, dan Troshani dalam Halibas, Sibyan, dan Maat (2017), kerjasama pentahelix menumbuhkan kreativitas koperasi dan membantu pengembangan sosial ekonomi daerah. Berdasarkan kearifan lokal.

Pendekatan pentahelix dibangun terdiri dari lima kategori pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media.⁵ Konsep ini sangat bermanfaat bagi permasalahan daerah dimana masing-masing stakeholder mewakili kepentingan daerah yang beragam. Melalui kerjasama yang sinergis, diharapkan suatu invensi yang didukung oleh sumber daya yang berinteraksi secara sinergis bisa terwujud. Lima komponen pentahelix berkontribusi saling bergantung, termasuk :

1. Pemerintah

Pemerintah bekerja sebagai regulator dan controller, bertanggung jawab atas pengembangan bisnis, dan memiliki aturan. Mencakup segala sesuatu mulai dari strategi hingga pelaksanaan hingga pemantauan hingga kontrol hingga promosi hingga alokasi anggaran hingga perizinan hingga program dan undang-undang hingga pengembangan hingga pengetahuan. Pemerintah juga bertugas mengkoordinasikan banyak pemangku kepentingan dalam prospek pertumbuhan suatu daerah.

2. Akademisi

Akademisi berperan sebagai drafter. Seperti menilai potensi dan mensertifikasi item dan kemampuan sumber daya manusia yang mendorong perluasan potensi suatu daerah. Akademisi termasuk sumber ilmu pengetahuan dengan ide, teori, dan relevansinya saat ini dengan keadaan perkembangan suatu daerah dalam hal ini.

3. Pelaku Bisnis

Pelaku bisnis berperan sebagai fasilitator. Pelaku bisnis yakni untuk memberi nilai tambah dan mempertahankan Pembangunan berkelanjutan. Pelaku usaha bisa berperan sebagai penyedia infrastruktur untuk teknologi dan uang tunai. Hal ini bisa membantu suatu daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif sebagai akibat dari perkembangan era digital.

4. Masyarakat/ Komunitas

Masyarakat/ Komunitas berfungsi sebagai katalisator. Dalam situasi ini, Masyarakat/Komunitas terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan bersama dalam kemajuan potensi manusia dan yang secara aktif berkontribusi untuk kemajuan itu. Memfasilitasi proses ekonomi dengan bertindak sebagai

titik kontak atau mediator antara beberapa pihak. Selain itu, Masyarakat berfungsi untuk memasarkan barang atau jasa suatu daerah.

5. Media

Media berfungsi sebagai expander. Media berperan dalam membantu dengan promosi dan penciptaan citra. Dengan gagasan pentahelix, perencanaan wilayah bisa terstruktur dengan baik dalam pelaksanaannya jika para pemain dalam konsep penta helix inidapat berkolaborasi dan membentuk suatu system untuk memakai suatu wilayah secara lebih efektif untuk pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi di tempat-tempat wisata.

Pendekatan model Pentahelix diharapkan dapat merangsang segala potensi ekonomi dan inisiatif lingkungan bagi pengembangan tempat- tempat wisata melalui peran pemerintah, Masyarakat, akademik, pelaku bisnis dan media yang ada. Pengembangan lokasi pariwisata juga memerlukan koordinasi dari beragam potensi dan sumber daya. Pengembangan pariwisata juga berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan dapat memberikan keuntungan bagi Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pentingnya pengembangan wisata di daerah tertentu memiliki efek pada ekonomi lokal.

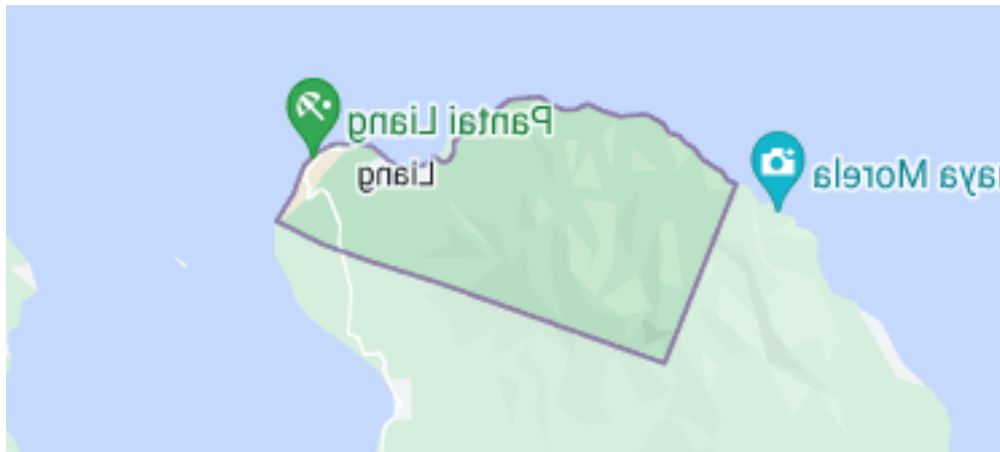
METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta di lapangan/lokasi penelitian, dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pengumpulan data penelitian, dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Seluruh hasil penelitian, baik dari wawancara, observasi, maupun studi pustaka, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan diperiksa dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang menarik. Hasil dari wawancara dan observasi dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis hubungan dan keterkaitan data dan merumuskan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Potensi Negeri Liang Sebagai Kawasan Wisata

Liang, adalah salah satu dari enam negeri/desa yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Negeri/desa ini tergolong sebagai negeri pesisir dan dikategorikan sebagai negeri swasembada. Sebagai sebuah negeri atau desa adat, Liang dipimpin oleh seorang raja yang berkedudukan layaknya kepala desa. Raja Liang bergelar sebagai tuan latu (raja). Secara geografis Negeri Liang adalah negeri pesisir dengan hamparan tanah datar yang luas. Dengan ketinggian wilayah permukiman rata-rata 8 m.dpl, negeri ini adalah negeri dengan ketinggian rata-rata paling rendah di Kecamatan Salahutu. Permukiman masyarakat Liang berada di pesisir timur laut Pulau Ambon, menghadap ke Selat Seram yang memisahkan Pulau Ambon dengan Pulau Seram. Bagian pedalaman negeri liang ditutupi oleh hutan hujan dan memiliki topografi bergunung- gunung yang cenderung kasar. Kondisi topografi yang sulit dijamah penyebabnya wilayah pedalaman Negeri Liang masih terbilang terawat. Keterjangkauan Desa Liang terbilang sangat baik, didukung oleh ketersediaan jalan (jalur darat) dan pelabuhan (jalur laut) yang memadai. Terletak dikecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang berjarak antara Liang dengan ibukota provinsi Ambon sekitar 38-41 km dan dapat ditempuh selama satu hingga satu setengah jam melalui perjalanan darat. Jarak ke Masohi yang merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah mencapai 251 km yang dapat dicapai melalui jalur laut. Berikut peta dan daftar kependudukan Negeri Liang :



Gambar 1. Peta Negeri Liang
Sumber : <https://www.google.com/maps>

Tabel 1. Data Kependudukan Negeri Liang

Jumlah Jiwa	17.123	Tahun 2023
Jumlah KK	3.424	Tahun 2023
Jumlah Laki-laki	8.096	Tahun 2023
Jumlah Perempuan	9.027	Tahun 2023
Jumlah Menurut Kelompok Umura). Usia 0-6 Tahun	544	Tahun 2023
b). Usia 7-12 Tahun	1.412	
c). Usia 13-17 Tahun). Usia 18-58 Tahun	1.637	
d). Usia 18-58 Tahun	11.230	
e). Usia 59 Tahun	2.300	
Jumlah KK Miskin	528	Tahun 2023
Jumlah KK Perempuan	5	Tahun 2023

Sumber: Negeri Liang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa usia produktif di Negeri Liang sangat banyak artinya Negeri Liang memiliki banyak potensi sumber daya manusia yang dapat diberdayakan bersama untuk membangun negeri, dengan kawasan Negeri yang strategis dan memiliki potensi. Kawasan yang strategis dan berpotensi yaitu wisata Pantai Hunimua. Pantai ini terletak di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dengan pesona laut yang indah dan memiliki bentangan pasir putih halus membuat Pantai Hunimua menjadi objek wisata yang banyak diminati masyarakat⁶. Dengan keindahan alami tersebut, Pantai Hunimua layak sebagai salah satu destinasi wisata yang potensial dalam membangun ekonomi daerah. Tidak hanya karena keindahan Pantai Hunimua yang alami, tetapi juga karena adanya aksesibilitas yang Mudah. Pantai Hunimua yang secara aksesibilitas tergolong sebagai lokasi wisata yang memiliki akses sangat baik. Perjalanan menuju Pantai Hunimua dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat dari Bandara Pattimura dalam waktu 2 jam. Pada hakikatnya Pantai Hunimua lebih mudah menarik dan mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara dibandingkan pantai yang lain. Akan tetapi, sarana dan prasarana penunjang atau daya tarik objek wisata Pantai Hunimua memiliki posisi yang sangat jauh.

Padahal jika dilihat lebih jauh selain keindahan alam Pantai dan lautnya, letak Pantai Hunimua di Negeri/desa Adat memiliki daya Tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal. Karena Negeri ini memiliki potensi Sejarah dan budaya yang khas untuk dikemas sedemikian rupa bagi para wisatawan yang datang. Selain itu luas hamparan Pantai Hunimua sejauh 1 km dan lebar 300 m berpotensi sangat besar dalam mendatangkan investor untuk pembangunan resort/hotel/villa, restoran/café, atau sarana prasarana lain yang relevan.⁷ Pantai Hunimua memiliki sejumlah kekuatan sebagai suatu destinasi wisata yang potensial dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Dengan aksesibilitas yang mudah dan beberapa potensi daya tarik wisata pendukung, ragam budaya, serta atensi masyarakat yang terbuka. Akan tetapi kelemahan yang dimiliki Pantai Hunimua seperti pengembangan daya tarik wisata belum sepenuhnya seperti sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan dan pengembangan yang belum baik. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah dan Masyarakat yang tidak sepenuhnya menyatu dalam sebuah gerakan yang saling mendorong dengan komitmen bersama seperti ketidaksepahaman dalam pikiran dan solusi terhadap masalah yang muncul, pada akhirnya menjadi kendala dalam pengembangan potensi wisata hingga saat ini.

Penetapan negeri Liang sebagai Kawasan Strategis Provinsi Maluku, seharusnya dapat menjadi peluang bagi masyarakat negeri untuk membangun desanya bersama-sama dengan pemerintah. Program penataan ruang ini tentu mendukung komitmen untuk meningkatkan perekonomian negeri, tidak terkecuali menata objek wisata Pantai Hunimua yang dimiliki oleh Negeri Liang sendiri⁸. Komitmen masyarakat dan pemerintah dapat dibangun melalui ruang dialog atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dengan menghadirkan pemerintah daerah, Pemerintah Negeri, Saniri, dan masyarakat secara terbuka. Terjalinnnya komitmen ini dimaksudkan untuk menekan pemerintah daerah agar membangun objek wisata Pantai Hunimua dan mengemas potensi Sejarah dan budaya secara layak serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi melancarkan dan memelihara keberlangsungan potensi wisata yang ada di Negeri Liang.

PEMBAHASAN

Fungsi Pentahelix dalam Pengembangan Kawasan Wisata di Negeri Liang

Terminology pentahelix pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam dokumen Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dan menciptakan pengalaman serta nilai manfaat pariwisata. Konsep Pentahelix menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, menciptakan pengalaman serta nilai manfaat kepariwisataan demi memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat, dan lingkungan sekitar, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran pemerintah dan komunitas. Mengetahui pengembangan Kawasan wisata Negeri Liang dengan penerapan model pentahelix, Terdapat 3 aspek penting syarat minimal bagi pengembangan sebuah destinasi wisata yaitu atraksi, amenities, aksesibilitas. Ketiga faktor ini memiliki peran penting dalam membangun pengalaman berwisata yang nyaman serta menyenangkan bagi wisatawan⁹. Menurut Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku bahwa pemerintah sedang memfokuskan pengembangan objek wisata pantai honimua pada bagian sarana dan prasarana berupa : kebutuhan air bersih, akses jalan yang harus diperbaiki, fasilitas aula, galeri ekonomi kreatif dan sentral industry yang disiapkan untuk pusat ole-ole, sarana outdoor seperti snorkling dan diving semuanya sedang dalam perencanaan. Terkait perencanaan kedepan masih terdapat kendala karena Pantai hunimua baru 50% dimiliki oleh pemerintah daerah 50% yang lainnya milik ahli waris. Hak milik belum sepenuhnya oleh pemerintah daerah sehingga pengembangan wisata belum dapat direalisasikan karena persoalan lahan (Hasil wawancara 2023).

Seharusnya hal ini tidak menjadi hambatan untuk mmengembangkan wisata di Negeri Liang. Sumber daya manusia di Negeri Liang sendiri cukup beragam dan kreatif untuk diberdayakan. Untuk memenuhi seluruh pengembangan objek wisata yang dimaksud oleh pemerintah dibutuhkan suatu kolaborasi dalam bentuk kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah Negeri, akademik, potensi media dan memberdayakan komunitas local. Komunitas local yang dapat diberdayakan yaitu komunitas pemuda dan komunitas Perempuan. Kolaborasi inilah yang dimaksud dengan peran pentahelix dalam mengembangkan Kawasan wisata di suatu daerah. Betapa pentingnya peran dari semua pihak pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Para pihak ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling terkait. Model pentahelix ini berupaya mendorong sektor pariwisata dan sistem kepariwisataan dengan meningkatkan peran government, business, community, academic, dan media untuk menciptakan nilai manfaat ekonomis yang bisa dipetik dari aktivitas kepariwisataan serta menimbulkan multiplier effect yang luas bagi masyarakat pada umumnya dan para pelaku pariwisata khususnya.

Komunitas pemuda Lokal Negeri liang KPA Patafuri misalnya mereka dapat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk fasilitas air, jalan, MCK,

sarana outdoor seperti snorkling dan diving . Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan pemuda-pemudi dalam komunitas ini, mereka sangat ingin untuk dilibatkan dalam pengembangan pariwisata di Negeri Liang. Mereka ingin dilibatkan dalam bentuk kolaborasi untuk menghadirkan wisata cultural attraction mengingat Negeri Liang sendiri adalah negeri adat. Wisata budaya dapat menarik perhatian pengunjung untuk mempelajari, menemukan, mengalami, dan mengonsumsi atraksi/produk budaya yang berwujud dan tidak berwujud di Negeri Liang. Atraksi ini berhubungan dengan serangkaian fitur material, intelektual, spiritual, dan emosional yang khas dari Masyarakat Negeri Liang yang mencakup seni dan arsitektur, warisan sejarah dan budaya, warisan kuliner, literatur, musik, industri kreatif, dan budaya yang hidup dengan gaya hidup, sistem nilai, kepercayaan, dan tradisi mereka (Hasil wawancara 2023).

Selain itu ada juga komunitas Perempuan khusus para ibu-ibu penjual di Negeri Liang, jika pemerintah daerah dan pemerintah Negeri/Desa membangun Kerjasama dengan mereka sebagai political power menghadirkan regulasi, dan menetapkan program-program yang strategis, serta prioritas kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, maka dapat menghidupkan komunitas Perempuan sebagai pelaku usaha yang ada di Negeri Liang. Kelompok Masyarakat/komunitas ini adalah pemilik sosial power, dan merupakan pelaku langsung di lapangan sebagai ujung tombak dalam menggerakkan pembangunan destinasi pariwisata. Pemerintah daerah juga dapat kolaborasi dengan para kelompok akademisi sebagai pihak yang memiliki power-knowledge berperan aktif memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah dan stakeholder lainnya demi kemajuan pariwisata di Negeri Liang. Dengan segudang disiplin ilmu yang dimiliki dan hasil-hasil kajian akademisnya, dapat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara kebijakan dan kepentingan Masyarakat di Negeri Liang. Terakhir adalah memanfaatkan fungsi media sosial (social media) untuk mempromosikan dan mempublikasikan pariwisata yang ada di Negeri Liang, sehingga dikenal di seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian perlu juga adanya sinergi, kolaborasi dan inovasi dari berbagai pihak pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan. Antara pemerintah daerah dan pemerintah Negeri Liang, salah satunya adalah diseminasi Dana Negeri. Urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah negeri, didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah negeri, didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negeri (Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri)¹⁰. Sementara itu, pendapatan negeri yang diperoleh yang dari: pendapatan asli negeri yang meliputi, pendapatan yang diperoleh dari usaha negeri, hasil kekayaan negeri, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dari hasil gotong royong, dari pungutan, dan dari lembaga kemasyarakatan, bantuan pemerintah yang meliputi, hasil pajak daerah kabupaten, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan

sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, pinjaman negeri, hasil kerja sama antar negeri¹¹.

Terdapat pula anggaran sebesar Rp119 miliar untuk program Sertifikasi CHSE bagi industri pariwisata seluruh provinsi di Indonesia. Sertifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan industri pariwisata (Travel.tempo.co, 2020). Jika semua dana desa diseminasikan kepada Masyarakat (komunitas lokal) dengan jelas maka dana desa dapat dikelola dengan baik, dapat dipastikan bahwa antara negeri dan daerah akan bahu membahu dalam membangun objek wisata yang ada di Negeri Liang. Pembagian keuangan menjadi jalan tengah dan salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam membangun komitmen yang dibentuk antara pemerintah daerah dan negeri dalam mengembangkan objek wisata di Negeri Liang. Tentunya, pembagian keuangan ini berlandaskan azas kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan orang/kelompok/golongan tertentu. Dengan demikian dari peran serta dan keberadaan pentahelix tersebut di atas, serta dengan melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing diharapkan bisa menggerakkan roda pembangunan serta mengembangkan pariwisata di Negeri Liang secara sustainable guna meningkatkan perekonomian Masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peran pentahelix yang telah dipaparkan diatas, dalam upaya mengembangkan dan membangun Pantai Hunimua sebagai objek wisata Negeri Liang, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara saksama. Pertama, diperlukan fungsi manajemen strategi Pantai Hunimua meliputi penetapan tujuan dan prioritas pengelolaan Pantai Hunimua. Penetapan ini pada akhirnya dengan harapan dapat menjadi acuan pengelola Pantai Hunimua dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal memudahkan dan mendorong keberhasilan strategi pengelolaan objek wisata maka dibutuhkan fungsi selanjutnya berupa manajemen komponen internal seperti organisasi pengelola yang bertugas untuk membuat rencana operasional, rencana kerja tahunan, rencana kerja penggunaan anggaran, rencana kerja untuk pembangunan fisik, dan rencana kerja lainnya yang berkaitan erat dengan pengelolaan Pantai Hunimua. Selanjutnya terkait pengorganisasian, saat ini Pantai Hunimua sudah dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku yang diwakilkan oleh beberapa pegawai. Akan tetapi, pengelolaan Pantai Hunimua tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal. Agar pengelolaan Pantai Hunimua dapat berjalan optimal, organisasi pengelola turunan dari Dinas Pariwisata harus dibentuk.

Kedua, perlu memberdayakan masyarakat Negeri Liang terutama komunitas lokal sebagai lanjutan dari poin diatas, organisasi pengelola turunan sebaiknya dibentuk dengan menempatkan masyarakat negeri didalamnya komunitas lokal sebagai pengelola inti. Hal ini karena masyarakat yang paling memahami apa yang dapat diberikan untuk negeri sebagai pengembangan wisata di Negeri Liang. Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah memberi ruang bagi masyarakat negeri didalamnya ada komunitas lokal untuk berkontribusi dengan tetap memprioritaskan pemuda-pemuda negeri/pihak luar yang berbakat

untuk menduduki bidang-bidang penting yang dibutuhkan seperti pariwisata, kesenian, ekonomi, hukum, kelautan, tata ruang, dan bidang lain yang relevan. Hal ini penting mengingat tempat wisata memerlukan banyak inovasi dan kreasi. Dalam melaksanakan suatu pemberdayaan masyarakat negeri maka masyarakat perlu mendapatkan suatu pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan pelatihan dan pengembangan kemampuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif seperti jasa pijat tradisional (*traditional massage*), pemandu wisata (*tour guide*), penjaga pantai, peningkatan kemampuan berbahasa asing, pelatihan surfing dan pelatihan lainnya yang mendukung pengelolaan objek wisata di Negeri Liang.

Ketiga, hal penting lainnya adalah membentuk suatu kerjasama berupa pemasaran dan promosi untuk menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Perlu dibentuk strategi pemasaran dan promosi yang baik. Strategi promosi ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi atau pelaku usaha, seperti: membuat promo paket liburan dan bekerja sama dengan pihak pemerintah dan pihak swasta, dengan travel pesawat, kapal laut, dan travel bus/minibus, juga media sosial seperti instagram, tiktok, facebook dan youtube.

Keempat, Menyiapkan regulasi tentang pengelolaan objek wisata dan retribusi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, Pasal 2,¹² menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata. Dengan demikian, untuk mengelola dan mengatur objek wisata desa, pemerintah Desa bersama pengelola objek wisata berwenang untuk membuat regulasi umum dan khusus terkait pengelolaan objek wisata. Regulasi yang disiapkan dalam rangka memaksimalkan potensi Pantai Hunimua, dapat berupa: regulasi mengenai pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata, prosedur pelaksanaan investasi, syarat dan ketentuan yang berlaku bagi para pelaku usaha, retribusi bagi para pelaku usaha, seputar keamanan dan kebersihan objek wisata (pengendalian lingkungan), aturan khusus untuk wisatawan baik lokal maupun asing.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini dapat terus berlanjut untuk menganalisis dan membahas setiap fungsi masing-masing dari berbagai elemen pentahelix di Negeri Liang lebih mendalam. Dengan demikian fungsi dari setiap elemen yang ada pada pentahelix Negeri Liang berupaya mendorong sektor pariwisata dan sistem kepariwisataan dengan meningkatkan peran-peran untuk menciptakan nilai manfaat ekonomis yang dapat diambil dari aktivitas kepariwisataan di Negeri Liang sehingga menimbulkan multiplier effect yang luas bagi Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Negeri Liang. Harapan peneliti semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan

didalam penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas perhatian dan pemberian semangat selama proses penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2019). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Pariwisata di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis*, 31-38.

Ali, Zainudin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika.

Koentjaraningrat. (1993). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rakhmat, Jalaludin. (1997). *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Singarimbun, Masri., dan Effendi, Sofian. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Solichin Abdul Wahab, (2021) *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sholih Muadi, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya. Ismail MH, Univeristas Islam Negeri Sunan. Ampel Surabaya Ahmad Sofwani, Institut Pertanian Malang. *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik Kamus Webster*.

Solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab) (2004:64)

Amin, Deny Yarusain. (2019). Kajian Pengembangan Objek Wisata Bahari Pantai Hunimua Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 5-8. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/download/922/743>

Fakih, Muhammad Fadli, dkk. (2017). Analisa Pola Kunjungan Wisatawan ke Berbagai Objek Daya Tarik Wisata di Pulau Ambon Menggunakan Frequent Pattern Growth. *KINETIK*, 2(3), 189-192. <https://doi.org/10.22219/kinetik.v2i3.46>

Halibas, et.al. Maata,(2017). The Pentahelix Model of Innovation In Oman : An Hei Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*. Volume 12. Informing Science Institute

H. W. A. & P. Y. D. Aribowo, "Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta

Meningkatkan Perekonomian Domestik," *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, vol. 3, no. 1, p. 31-38, 2018.

Jurnal Kepariwisata.go.id. VOL. 15. Desember 2021.

O. A. Yoety, *Ekonomi pariwisata: introduksi, informasi, dan aplikasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Syamsuddin, dkk. (2019) Dampak Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Liang Terhadap Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 12(1), 73. DOI:<http://dx.doi.org/10.33477/dj.v12i1.792>

Rudy. (2019, Mei). Pantai Ora, Surga Eksklusif yang Tersembunyi di Maluku Tengah. Diakses dari <https://www.nativeindonesia.com/pantai-ora/>

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA. http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Permendagri_No_30_Th._2006_Ttg_Tata_Penyerahan_Urusan_Pemerintahan_Kabupaten_Kota_Kepada_Desa_.PDF

Republika. (2016, Agustus). Pantai Liang di Maluku Diusulkan Masuk 10 Destinasi Wisata Prioritas. Diakses dari <https://republika.co.id>

Rri.co.id. Penyerapan APBN Sektor Kesehatan dan Pariwisata di Maluku. Diakses dari <https://rri.co.id>